

About Citarum, Thousands of Companies Do not Have IPAL.

Contributed by Maizer
Thursday, 03 May 2018

Coordinating Minister for Marine Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan, who has been appointed by President Joko Widodo as the Chairman of the Citarum River Basin Team, complained that there are still many companies that do not have wastewater treatment plant (IPAL).

Luhut said industrial waste disposal was one of the main problems in the Citarum River cleaning effort. Of the 3,226 textile industries in Jakarta and West Java, he found as many as 90 percent of them do not have WWTP. "After this I will meet the companies who are around the Citarum River there are 3,200-an company. Want to tell them how dangerous this," said Luhut after inaugurating the program of Critical Work Course (KKN) Citarum Harum at Universitas Padjajaran, Bandung, West Java. During the meeting, Luhut stated that he would socialize the content of Presidential Regulation (Perpres) No. 15 of 2018 on Acceleration of Pollution Control and Watershed Damage (Citarum). Luhut states no matter if two to four companies build one the same WWTP. He stressed the existence of WWTP is mandatory for all industries ranging from small, medium, and large scale so that water can be reused. At the meeting, Luhut will also remind the company of environmental law enforcement procedures. Soal Citarum, Ribuan Perusahaan Belum Punya IPAL. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang telah ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Pengarah Tim Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mengeluh karena masih banyak perusahaan yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Luhut menyatakan pembuangan limbah industri adalah salah satu masalah utama dalam upaya pembersihan Sungai Citarum. Dari 3.226 industri tekstil di Jakarta dan Jawa Barat, ia mendapati sebanyak 90 persennya belum memiliki IPAL. "Setelah ini saya akan bertemu perusahaan-perusahaan yg ada di sekitar Sungai Citarum ada 3.200-an perusahaan. Mau memberi tahu mereka bagaimana bahayanya ini," kata Luhut usai meresmikan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Citarum Harum di Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu, Luhut menyatakan bakal menyosialisasikan isi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum. Luhut menyatakan tak masalah andai dua hingga empat perusahaan membangun satu IPAL yang sama. Ia menegaskan keberadaan IPAL itu wajib untuk semua industri mulai dari skala kecil, menengah, dan besar agar air bisa dimanfaatkan kembali. Pada pertemuannya, Luhut juga akan mengingatkan kepada perusahaan tentang prosedur penegakan hukum lingkungan.